

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

20 tahun terakhir telah ditandai oleh perubahan signifikan dalam struktur produktif dan kompetisi internasional. Masuknya pesaing baru, seperti Jepang pada 1980-an dan Cina dan India baru-baru ini; perubahan teknologi seperti difusi teknologi informasi dan telekomunikasi (TIK) dan terobosan ilmiah seperti rekayasa genetika dan pengembangan bioteknologi; perubahan kelembagaan seperti pendalaman integrasi Eropa dan perluasan Uni Eropa (UE); perubahan sosial dan demografis seperti penuaan populasi di negara maju; dan seterusnya telah menyebabkan perlunya penyesuaian struktural yang begitu signifikan untuk mendesain ulang ekonomi dan masyarakat di luar batas negara-negara nasional.

Semua perubahan ini menyiratkan definisi kebijakan industri baru, di tingkat nasional dan internasional. Bahkan, pendekatan baru terhadap kebijakan industri telah dicoba di seluruh dunia, khususnya perumusan dan implementasi kebijakan 'dari bawah' (lokal atau regional), dalam konteks di mana otoritas pusat tampaknya tidak lagi memiliki paksaan. dan kekuatan perintah yang mereka miliki. Sebaliknya, kebijakan industri tipe lama adalah intervensi langsung oleh negara pusat di pasar untuk memilih pemenang dan mendukung pengembangan sektor-sektor tertentu. Kebijakan ini berfungsi dalam konteks di mana negara nasional memang menjadi rujukan (Patrizio, 2006: 3).

Semua perubahan ini menyiratkan definisi kebijakan industri baru, di tingkat nasional dan internasional. Bahkan, pendekatan baru terhadap kebijakan industri telah dicoba di seluruh dunia, khususnya perumusan dan implementasi kebijakan 'dari bawah' (lokal atau regional), dalam konteks di mana otoritas pusat tampaknya tidak lagi memiliki paksaan. dan kekuatan perintah yang mereka miliki.

Sebaliknya, kebijakan industri tipe lama adalah intervensi langsung oleh negara pusat di pasar untuk memilih pemenang dan mendukung pengembangan

sektor-sektor tertentu. Kebijakan ini berfungsi dalam konteks di mana negara nasional memang menjadi rujukan. Banyak kontroversi yang paling mendasar dan sering terjadi dalam bidang ekonomi berkisar pada dua rangkaian masalah terkait: arti-penting dan signifikansi dari kegagalan pasar dan peran negara dalam mengatasinya. Mereka muncul dalam bentuk yang sangat akut dalam literatur tentang kebijakan industri. Dipahami secara luas, kebijakan industri mengacu pada langkah-langkah kebijakan publik yang bertujuan untuk mempengaruhi alokasi dan akumulasi sumber daya, dan pilihan teknologi (Stiglitz, 2017: 1).

Kebijakan industri sebagai beragam tindakan publik yang bertujuan memandu dan mengendalikan proses transformasi struktural suatu ekonomi. Asumsi implisit adalah bahwa proses industrialisasi sangat penting untuk transformasi ekonomi secara keseluruhan dan dimungkinkan untuk bertindak pada proses ini untuk memandu seluruh mekanisme perubahan struktural. Tindakan publik bersifat ganda dan beragam, mulai dari tindakan yang mendefinisikan aturan permainan kompetitif hingga tindakan yang ditujukan untuk mendukung partisipasi dan kinerja individu dan perusahaan tertentu dalam permainan kompetitif (kondisi kerangka kerja).

Hal itu sejalan dengan pemahaman bahwa sumber kemakmuran kita adalah organisasi ekonomi kita. Tetapi untuk institusi kepemilikan pribadi dan jaringan aturan yang rumit yang kita sebut kapitalisme, tidak ada yang kita nikmati sekarang yang mungkin. Membuat klaim semacam itu tidak berarti menyangkal bahwa klaim serupa lainnya mungkin sama-sama valid. Tetapi untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak ada satu pun dari apa yang kita nikmati sekarang yang mungkin. Tetapi untuk pengembangan kebebasan politik dan demokrasi, semua ini tidak mungkin terjadi (Usher, 2003: 1).

Tidak dapat dihindari, pengukuran pendapatan nasional riil adalah fuzzy karena indeks harga tidak pernah seperti yang kita inginkan, karena orang yang berbeda mengkonsumsi proporsi barang yang berbeda, karena jenis barang baru diperkenalkan dari waktu ke waktu, dan karena kualitas barang berubah seiring waktu. Statistik pendapatan nasional riil tidak memiliki ketepatan, misalnya jarak

antara kota. Statistik pendapatan nasional sebenarnya menarik dan instruktif (Usher, 2003: 15).

Industri memiliki kapasitas untuk mengatur produksi, memobilisasi aset berwujud dan tidak berwujud, dalam arti menggunakan aset yang ada dan menciptakan aset baru yang diperlukan. Karena itu, kebijakan industri menyangkut semua kegiatan produktif. Kebijakan industri dalam pengertian ini berasal dari penegasan negara modern dan kemunculan kapitalisme. Memang ketika kapitalisme berkembang, kapasitas untuk mengatur produksi, dan bukannya ketersediaan sumber daya alam yang langka, menjadi penentu utama kekayaan bangsa.

Namun, alasan dan isi kebijakan industri telah banyak berubah sejak awal kapitalisme dan terutama selama 20 tahun terakhir. Elemen utama kebijakan industri tetap sama, yaitu definisi strategi industri, kebijakan dan peraturan persaingan, kebijakan teknologi, kebijakan regional dan teritorial, pendekatan metodologis, dan analisis konseptual (Patrizio, 2006: 3).

Industri merupakan wilayah bagi negara dalam meningkatkan perekonomian nasionalnya. Industri dalam negeri menjadi faktor penunjang aktifitas ekonomi sebuah negara. Meski industri memerlukan biaya besar dan teknologi tinggi, negara tetap dalam menjalankan aktifitas industri nasionalnya dengan menggandeng negara lain yang lebih maju melalui sebuah bentuk kesepakatan kerjasama.

Kontrol atas alat-alat produksi kekayaan dan kekuatan politik selalu terkait erat satu sama lain. Namun, dengan lahirnya kapitalisme dan dengan konsolidasi negara modern maka ketentuan masalah mengambil makna baru. Revolusi industri Inggris berasal dari konvergensi kekuatan sosial yang luar biasa yang menentukan pemutusan struktural yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah dunia.

Pertama-tama, ada pembangunan negara kesatuan dengan kerangka legislatif dan struktur manajemen yang muncul dari konflik selama berabad-abad

antara kekuatan parlemen yang tumbuh dan monarki yang semakin harus mengakui hak-hak manusia dan komunitas lokal.

Revolusi industri itu sendiri merupakan ekspresi dari revolusi 'borjuis' yang menggantikan raja dan mandat ilahi dengan sebuah bangsa dan negara. Di negara itu individu tidak lagi menegaskan diri mereka sesuai dengan hak yang diperoleh dari leluhur tetapi berkat kapasitas untuk mengumpulkan kekayaan yang cukup bagi mereka untuk terkooptasi dalam sistem komando masyarakat tempat mereka tinggal.

Negara modern menyatakan dirinya, sebagai sebuah organisasi di mana kekuatan politik bersatu dan berekspresi, berkat aset eksplisit seperti seperangkat aturan, peran dan sumber daya yang didefinisikan secara tepat digunakan untuk melayani kepentingan dan tujuan yang bersifat kesatuan dan spesifik (Patrizio, 2006: 4-5).

Secara komprehensif, industri berbicara tentang: (Stiglitz, 2017: 12)

1. Kebijakan industri yang ditargetkan untuk sektor sangat penting untuk mencapai perubahan struktural yang dinamis dan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan berkelanjutan;
2. sebagian besar kebijakan industri gagal karena mereka menargetkan industri yang tidak kompatibel dengan keunggulan komparatif negara;
3. kebijakan industri yang berhasil harus menargetkan industri yang merupakan keunggulan komparatif laten negara;
4. pengalaman historis menunjukkan bahwa pada tahap catching-up, kebijakan industri negara-negara yang sukses, secara umum, telah menargetkan industri-industri di negara-negara dengan struktur dana abadi yang serupa dan entah bagaimana pendapatan per kapita yang lebih tinggi; dan
5. kerangka identifikasi dan fasilitasi pertumbuhan yang didasarkan pada ekonomi struktural baru, merupakan cara baru

dan efektif untuk menargetkan industri keunggulan komparatif laten dan mendukung pertumbuhan mereka.

Industrialisasi pertama kali terjadi di Inggris. Negara tersebut adalah yang pertama kali lepas dari ‘Zaman Kegelapan’ dari feodalisme, melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada proses produksi ekonomi.

Negara tersebut juga yang pertama kali berhasil menerapkan sistem pabrik modern pada tekstil, dengan menerapkan inovasi yang meningkatkan produksi melalui mekanisasi, pertumbuhan teknologi tersebut membuat pabrik-pabrik bisa memberikan upah yang lebih tinggi, dan menarik pekerja yang semula bekerja di pertanian ke sektor industri domestik, dan secara bertahap penggunaan teknologi juga diterapkan pada industri-industri selain yang bergerak di bidang tekstil. Transformasi yang cepat di Inggris ini terjadi pada tahun 1760 – 1830, yang sering disebut sebagai Revolusi Industri yang sesungguhnya (Damayanthi, 2008: 70).

Globalisasi jauh lebih dari sekadar memindahkan pekerjaan dan kegiatan dari negara maju ke negara dengan tenaga kerja berbiaya lebih rendah. Kesimpulan sederhana semacam itu mengaburkan kerumitan rumit hubungan lintas batas yang telah berevolusi dari strategi perusahaan yang berusaha menyeimbangkan kaleidoskop variabel termasuk biaya tenaga kerja dan persediaan, transportasi, kualitas, konsentrasi pengetahuan yang berharga dalam kelompok, dan temporal. kedekatan dengan pelanggan. Memahami strategi perusahaan pada saat yang bersamaan cukup rumit, tetapi sayangnya variabel-variabel ini juga berfluktuasi.

Misalnya, Singapura — pada suatu waktu lingkungan berbiaya rendah dengan infrastruktur yang lemah untuk pembuatan hard disk — lebih dari dua dekade berkembang menjadi lingkungan berbiaya tinggi dengan infrastruktur yang sangat canggih. Hari ini Singapura adalah pusat manufaktur, R&D, dan logistik (Kenney, 2004: 1).

Bagi Indonesia, industri nasional dapat berjalan, salah satunya, melalui kerja sama kawasan industri dengan Singapura. Kerja sama kedua negara dimulai dari pertemuan kedua kepala negara, yaitu President Joko Widodo (Indonesia) dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, dalam peresmian Kawasan Industri Kendal (KIK). Kedua kepala negara menyepakati kerjasama industri dan ekonomi digital. Kesepakatan tahun 2016 tersebut kemudian melahirkan berbagai MoU yang ditandatangani pada tahun 2018 untuk kerjasama-kerjasama di masa mendatang. Di sisi lain, kesepakatan yang dibuat tahun 2016 tersebut juga mendorong investasi industri pengusaha Singapura dalam jumlah besar sampai pada tahun 2017.

Indonesia, sebagai mata rantai negara berkembang juga tidak luput terkena demam industrialisasi tersebut. Semenjak pembangunan ekonomi dimulai secara terencana mulai tahun 1969, Indonesia mulai menggunakan pendekatan strategi Industrialisasi (Ahmad Erani Yustika, 2007). Cita-cita industrialisasi nasional adalah menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyat, dalam pengertian; kebutuhan barang dan jasa tercukupi, masyarakat punya daya beli, karena penghasilan yang layak disertai produktivitas tinggi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang maju secara adil dan merata. Berdiri sejajar dengan itu, industrialisasi juga bermakna membangun ketahanan ekonomi nasional, sehingga kedaulatan sebagai negara-bangsa nyata terwujud (Damayanthi, 2008: 69).

Secara detail, Indonesia dan Singapura menyepakati pengembangan kawasan industri dan industri manufaktur, sebagai kerja sama kedua negara. Kesepakatan dihasilkan saat Presiden Joko Widodo bertemu dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Dalam pernyataannya, PM Lee mengatakan bahwa KIK yang diresmikan oleh Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Lee pada tahun 2016 telah berjalan dengan baik. Selama setahun, KIK telah mendatangkan sekitar USD500 juta untuk investasi, dan menciptakan sekitar 4.000 lapangan pekerjaan. Ada sejumlah rencana mendirikan Politeknik di Kawasan Industri Kendal untuk menciptakan tenaga kerja yang terlatih untuk mendukung proyek-proyek yang ada," (Kemenlu, 2017).

Perusahaan dan industri menghasilkan kekuatan ekonomi yang kuat yang membentuk kehidupan semua manusia. Seringkali industri diperlakukan sebagai kotak hitam, sebuah perspektif yang menyiratkan bahwa pergeseran ekonomi, perubahan teknologi, dan dinamika pasar akan membentuk setiap industri dengan cara yang sama. perusahaan sangat berbeda, dan dengan demikian, mereka untuk menciptakan keuntungan beragam. Perusahaan-perusahaan di dalam industri sedang berkembang, seperti juga lokasi di mana mereka beroperasi.

Konfigurasi saat ini adalah respons terhadap kondisi masa lalu dan strategi perusahaan sebelumnya. Sejarah penting, sejauh keputusan sebelumnya membentuk lanskap kontemporer di mana perusahaan bersaing untuk keunggulan kompetitif di masa depan (Kenney, 2004: 2).

Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk saling meningkatkan kerja sama yang intensif di bidang ekonomi khususnya sektor industri. Hal ini ditandai dengan pertemuan kedua kepala negara, Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dalam rangka perayaan 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Singapura (Kemenperin 2018).

Indonesia dan Singapura siap melakukan kerja sama antara perguruan tinggi kedua negara. Langkah ini untuk mendukung program peningkatan kompetensi SDM serta pendidikan dan pelatihan vokasi yang sejalan dengan implementasi industri. Selain menggenjot investasi, Indonesia dan Singapura sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan vokasi, khususnya untuk sektor industri. Hal ini semakin memperkuat kemitraan kedua negara dalam rangka saling melengkapi potensi ekonomi yang sangat besar.

Komitmen kerja sama di bidang pendidikan vokasi, telah terimplementasi melalui penandatanganan MoU antara Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto dengan Menteri Pendidikan (Pendidikan Tinggi dan Keterampilan) Singapura, Ong Ye Kung pada September 2018 lalu di Singapura. Penandatanganan MoU tersebut disaksikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong (Kemenperin 2018).

Singapura merupakan negara dengan pilihan tepat bagi Indonesia dalam melakukan kerja sama industri. Hal itu menjelaskan bahwa Singapura memiliki kemampuan industri yang cukup baik, terutama bagi Indonesia dalam meningkatkan kemampuan industrinya.

Industri didasarkan pada serangkaian basis pengetahuan dan kemampuan yang dibuat, setidaknya sementara, diperbaiki secara spasial, dan dilaksanakan dalam lingkungan sosial tertentu. Secara garis besar, suatu industri dapat berkelompok atau tidak, dan kemudian suatu kelompok dapat terdiri dari saingan (yaitu, kelompok horisontal) atau perusahaan pelengkap (yaitu, kelompok vertikal) seperti pemasok dan pelanggan — atau mengandung keduanya.¹¹ Industri menunjukkan spektrum perilaku pengelompokan.

Misalnya, industri PC menunjukkan pengelompokan kecil di luar Taiwan (dan sekarang Tiongkok), di mana manufaktur dikelompokkan, sedangkan dalam HDD, seperti yang ditunjukkan Kendrick, ada gugus desain dominan di Silicon Valley dan cluster produksi berpusat di Singapura (Kenney, 2004: 10).

Dengan begitu, kemampuan industri Singapura diharapkan memberikan dampak positif, tidak hanya keuntungan ekonomi, namun juga kemampuan sumber daya manusia dan teknologi yang dapat diterapkan di Indonesia.

Faktor "baru" dalam globalisasi mengubah peran tradisional yang dapat dimainkan industri pakaian dan tekstil dalam pembangunan ekonomi. Faktor-faktor yang dipertimbangkan di sini tidak mengubah daya tarik industri tekstil dan tekstil untuk pengembangan. Tetapi memastikan keberhasilan industri-industri tersebut menjadi lebih kompleks karena beberapa alasan.

Banyak negara dengan infrastruktur yang tidak memadai, lokasi yang jauh dari pasar konsumen utama, atau ketidakstabilan politik (atau bahkan iklim) akan berada pada kerugian kompetitif yang cukup besar untuk banyak produk pakaian jadi, bahkan jika mereka memiliki tingkat upah yang rendah.

Lebih jauh, untuk kategori pakaian jadi di mana pengisian bukan merupakan faktor utama dalam pengadaan, kehadiran sejumlah besar negara

dengan kapasitas pakaian jadi yang luas berarti persaingan yang lebih ketat di antara negara-negara ini untuk pasar yang lebih kecil dari produk-produk non-perbaikan. Bersama-sama, kekuatan-kekuatan ini akan membuat masa depan industri pakaian jadi hanya bergantung pada upah rendah sebagai sumber keunggulan kompetitif (Kenney, 2004: 41-42).

Melihat perkembangan kerjasama industri yang mengarah pada manufaktur dan kawasan industri, maka kedua negara mendukung kerjasama tersebut. Menariknya, kerjasama industri kedua negara memberikan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan investasi Singapura sekaligus menyerap tenaga kerja yang cukup besar, serta peningkatan teknologi industri bagi Indonesia.

Globalisasi dapat dibagi menjadi empat dinamika utama: (a) globalisasi pasar, (b) globalisasi produksi, (c) globalisasi kepemilikan, dan (d) globalisasi produk. Kategori (a) dapat dibagi lagi menjadi dua sub-efek: (1) efek kompetitif, dan (2) efek perdagangan. Globalisasi produksi, kategori (b), biasanya memerlukan relokasi fungsi perusahaan melalui proses investasi langsung asing (FDI) dan dapat dibagi untuk menghasilkan tiga subkategori tambahan, yang masing-masing kemungkinan memiliki efek yang berbeda. tentang pekerjaan: (3) investasi pencarian pasar, (4) investasi pemotongan biaya, dan (5) investasi pemecah kendala. Kategori (c), globalisasi kepemilikan, dapat dibagi menjadi merger dan akuisisi lintas batas yang terjadi pada tingkat (6) pembuat mobil dan yang terjadi pada tingkat (7) pemasok. Kategori (d) adalah hasil konsolidasi pembuat mobil serta upaya untuk mengurangi biaya pengembangan dengan berbagi bagian dan platform kendaraan di berbagai produk sebanyak mungkin (8) karakteristik produk menjadi semakin mengglobal (Kenney, 2004: 55-56).

"Mega-merger" di telah menjadi fakta kehidupan di industri otomotif. Keyakinan di antara para pelaku adalah bahwa hanya pembuat industri global yang akan bertahan dalam transisi menuju ekonomi yang sepenuhnya terglobalisasi. Ada beberapa masalah yang diharapkan dapat diatasi oleh mega-merger transnasional. Pertama adalah bahwa skala ekonomis yang lebih besar dapat dicapai di bagian-bagian yang membeli.

Kedua adalah bahwa merger akan memungkinkan industri untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas dengan mengkonsolidasikan produksi di lebih sedikit pabrik.

Ketiga adalah bahwa merger akan membantu mengatasi biaya pengembangan kendaraan yang meroket. Dengan menggunakan kembali modul dan elemen desain lainnya di berbagai model industri yang lebih luas Untuk perusahaan besar, akuisisi produsen khusus adalah cara untuk memperluas lini produk mereka (Kenney, 2004: 66).

Saat ini, mayoritas investor di KIK bergerak dalam industri manufaktur. Dirjen Pengembangan Perwilayahannya Industri (PPI) Kemenperin Imam Haryono menyatakan, *anchor* dari kawasan industri tersebut adalah PT Tat Wai Industries. Perusahaan itu bergerak dalam bidang industri furnitur yang berasal dari Singapura (Audriene, 2017).

Kerja sama ini menjelaskan ruang lingkup basis pasokan tumbuh melampaui batas-batas nasional, dan ketika dikombinasikan dengan peningkatan outsourcing, ini menjelaskan mengapa banyak pelaku industri menjadi semakin tergantung pada lokasi domestik dan asing untuk suku cadang.

Namun, ada dua kekuatan yang menghambat sumber global yang tidak terkekang. Pertama, ada kebutuhan untuk pemasok modul untuk terlibat awal dalam proses desain. Kedua, aturan konten lokal dapat secara efektif memblokir pengiriman komponen dari sumber murah ke jaringan pabrik perakitan di seluruh dunia.

Suku cadang yang dibeli secara lokal biasanya harganya lebih mahal daripada yang diperoleh melalui organisasi pembelian global, dan aturan konten lokal meniadakan penerapan strategi sumber global yang benar-benar murah. Dalam praktiknya, suku cadang yang dapat bersumber global cenderung sangat terstandarisasi, mudah diangkut, dan dikenakan tarif rendah (Kenney, 2004: 68).

Dalam industri manufaktur di KIK, investor yang sudah masuk adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri furnitur, makanan, kemasan

makanan, baja, label printing, dan mainan. Saat ini, terdapat lima perusahaan yang telah beroperasi di KIK yaitu PT Tat Wai Industries dari Singapura dengan luas lahan sekitar 10.000 meter persegi dengan usaha di bidang furnitur (Antara, 2017).

Penciptaan pasar internal yang besar diperlukan untuk pengembangan organisasi yang produktif dan untuk penggunaan penuh skala ekonomi statis dan dinamis untuk mengurangi harga dan memulai persaingan melawan produsen lokal. Penciptaan pasar internal yang besar juga membutuhkan negara pusat yang terorganisir yang mampu menyatukan sistem fiskal, aturan keuangan dan moneter, sistem bobot dan ukuran dan, di atas semua itu, untuk menstabilkan sistem pengakuan hak properti, tidak hanya untuk fisik barang, tetapi juga untuk barang tidak berwujud.

Ketika pasar internal ini tidak lagi mencukupi, perluasan kekuatan-kekuatan produktif di luar batas-batas nasional harus didukung; dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Inggris mulai memberikan tekanan politik pada negara-negara lain.

Ketersediaan bahan baku berasal dari kemungkinan menentukan hak kepemilikan atas tanah dan lisensi untuk eksplorasi tanah, karenanya pada barang publik. Ketersediaan sumber daya investasi membutuhkan kemungkinan transfer sumber daya lintas sektor, misalnya dari pertanian ke industri, dan keterpaduan dan integrasi antara kelas yang berkuasa dan kapasitas untuk mengatur pasar keuangan baru (Patrizion, 2006: 5).

Untuk itu, penelitian ini akan mengambil periode 2016-2017. Periode 2016 menjelaskan peresmian KIK dan implementasi langkah sinergi pelaku industri kedua negara yang telah terimplementasi oleh PT Jababeka Tbk dan Sembcorp Development Ltd dalam pengembangan Kawasan Industri Kendal (KIK) sebagai kawasan industri terpadu di Jawa Tengah dengan standar internasional. Tahun 2017 menunjukkan peningkatan investasi oleh Singapura di KIK

1.2. Rumusan Masalah

Kerjasama ekonomi antar dua negara merupakan bagian dari adaptasi kebijakan luar negeri setiap negara di dalam era globalisasi. Kerja sama ekonomi ditujukan untuk meningkatkan, tidak hanya perekonomian nasional, namun juga kesiapan domestik dalam membangun industri dalam negeri. Indonesia dan Singapura memiliki kesepakatan yang dijalankan melalui Kerjasama di Kawasan Industri Kendal. KIK menjadi poin penting dalam memulai kerja sama industri antara keduanya. Dalam melihat perkembangan kerjasama antara Indonesia-Singapura yang menunjukkan keterlibatan dan keseriusan kedua negara dan telah menghasilkan berbagai program dan agenda kerja.

Dalam mengamati perkembangan isu di atas, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

“Bagaimana kerja sama kawasan industri dan manufaktur Indonesia-Singapura periode 2016-2017?”

1.3. Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Menganalisa kerjasama ekonomi bilateral Indonesia-Singapura, melalui industri KIK dalam mendorong industri manufaktur.

1.4. Manfaat Penelitian

- 1.4.1. **Manfaat Praktis.** Memberikan manfaat praktis kepada penulis untuk mengetahui lebih komprehensif tentang kerjasama ekonomi yang dijalankan melalui kerja sama industri
- 1.4.2. **Manfaat Akademis.** Memberikan wawasan tentang kerjasama kawasan industri yang berperan penting dalam peningkatan kualitas industri maupun keuntungan ekonomi bagi negara, terutama Indonesia, dalam membangun Kawasan Industri Kendal.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis akan menyusun sistematika penulisan sesuai dengan panduan penulisan skripsi dan isu ekonomi politik internasional yang diambil dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Bab Satu tentang Latar Belakang, Rumusan Permasalahan, Tujuan dan Manfaat Penelitian.
2. Bab Dua berisi tentang Tinjauan Pustak yang menjelaskan penelitian-penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran yang terdiri dari konsep dan teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang diangkat
3. Bab Tiga fokus pada metodologi yang menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisa data.
4. Bab Empat tentang analisa yang ditujukan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.
5. Bab Lima menjadi bab yang berisi tentang Kesimpulan dan Saran Penelitian.

